

BAB I

PENDAHULUAN

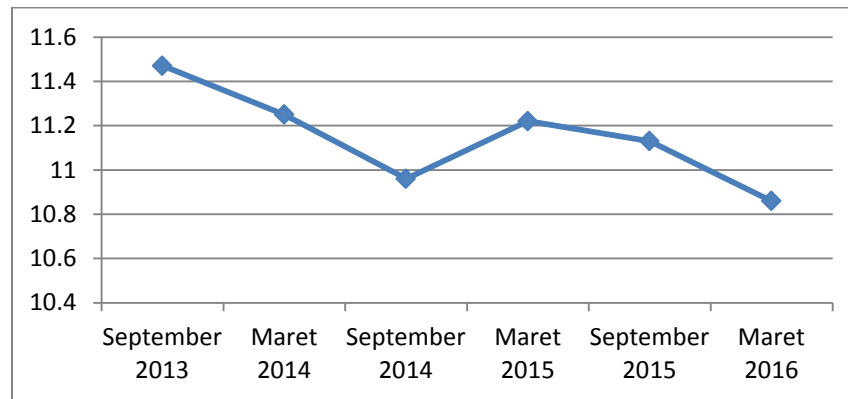
A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, pembangunan ekonomi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan pemindahan kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Selain itu, pembangunan ekonomi juga didefinisikan sebagai usaha untuk mengurangi atau menghapus kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam pembangunan yang semakin berkembang (Todaro, 2011). Hal ini berarti kemiskinan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan menurut pandangan ekonomi baru.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan dapat terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan primer maupun sekunder, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Alhumani (2006), definisi baru kemiskinan bukan lagi masalah kesenjangan pendapatan, melainkan lebih kompleks menyangkut ketidakberdayaan, ketiadaan pengetahuan dan keterampilan dan kelangkaan akses pada modal dan sumber

daya. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya mengatasi masalah kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir dkk, 2009).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Masyarakat dikelompokkan menjadi penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan diperoleh dari menghitung jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil di konsumsi penduduk referensi yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan nonmakanan diperoleh dari menjumlahkan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi nonmakanan terpilih seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan metode ini, dapat dihitung persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Berikut persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia per semester mulai bulan September 2013 sampai Maret 2016.

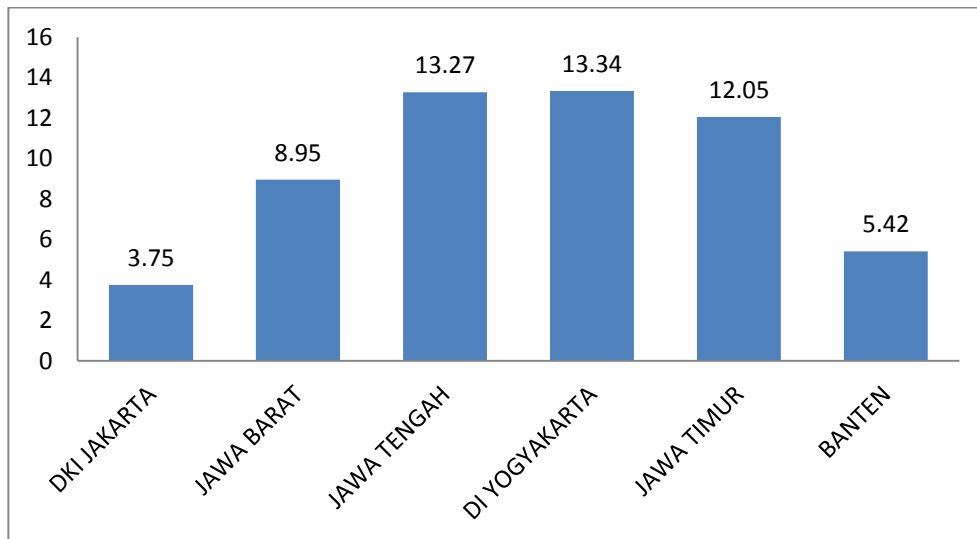


Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2016, diolah

Gambar 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode September 2013 sampai Maret 2016 cenderung mengalami penurunan. Pada September 2013, persentase penduduk miskin sebesar 11,47% turun menjadi 10,86% pada periode Maret 2016. Kenaikan hanya terjadi pada periode Maret 2015 menjadi 11,22% karena pada saat itu pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga berdampak pada meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok selama periode tersebut. Namun kemudian, terjadi penurunan pada September 2015 menjadi 11,13% dan pada Maret 2016 menjadi 10,86%. Dari jumlah tersebut, diperlukan usaha pengentasan kemiskinan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi, terutama di Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat pembangunan ekonomi.

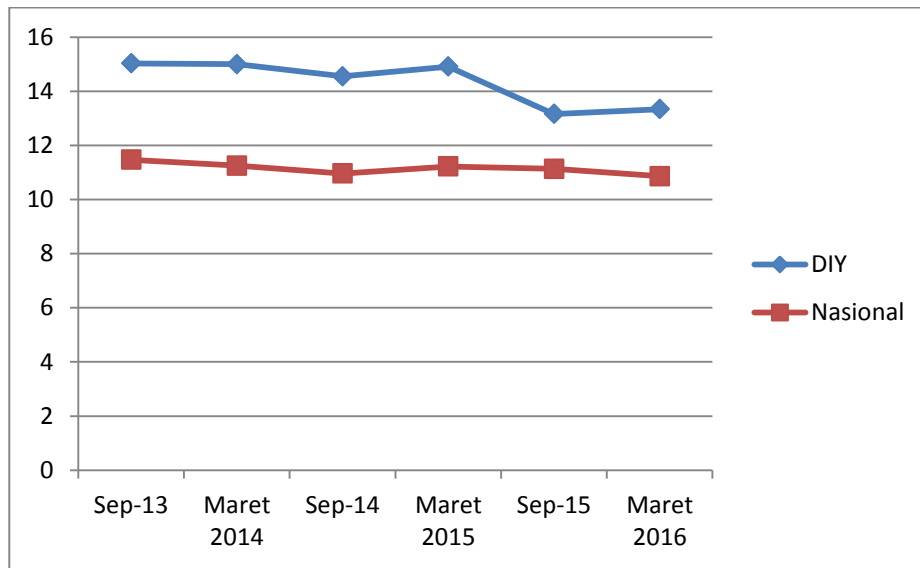
Berikut ini, persentase kemiskinan masing-masing provinsi di Pulau Jawa pada periode Maret 2016.



Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2016, diolah

Gambar 1.2
Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari enam provinsi di Pulau Jawa, persentase penduduk miskin terbesar adalah Provinsi D.I Yogyakarta sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi D.I Yogyakarta memiliki jumlah penduduk miskin yang paling banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa, masih lebih besar daripada persentase kemiskinan secara nasional. Berikut grafik perbandingan persentase kemiskinan di D.I Yogyakarta dengan nasional.



Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2016, diolah

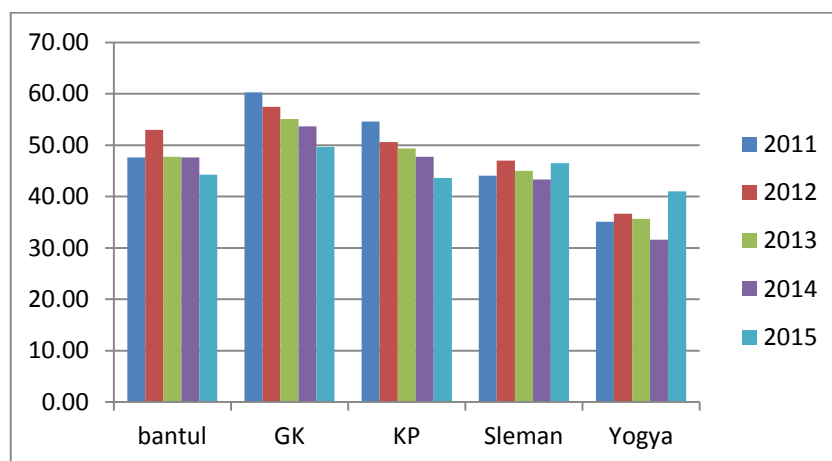
Gambar 1.3
Persentase Penduduk Miskin Provinsi D.I Yogyakarta dan Nasional

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase kemiskinan selama September 2013 sampai dengan Maret 2016, Provinsi D.I Yogyakarta lebih besar daripada persentase penduduk miskin secara nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di D.I. Yogyakarta masih tinggi.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, diperlukan berbagai upaya pembangunan dan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan anggaran pendapatan dan belanja yang cukup untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Anggaran pendapatan dan belanja tersebut tertuang dalam suatu rancangan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelola keuangan daerah dalam tahun tertentu yang berisi pendapatan dan pembiayaan dana pemerintah. Pemerintah melaksanakan pembangunan berdasarkan APBD tersebut. Demikian juga

dengan program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan juga bersumber dari APBD tersebut, seperti Program Keluarga Harapan, Program Beras untuk Keluarga Miskin, Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Salah satu program atau kebijakan yang diterapkan pemerintah D.I Yogyakarta dalam mengentaskan kemiskinan adalah meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki pilihan dalam mencari pekerjaan dan semakin produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Apabila pendapatan masyarakat meningkat maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, mutu pendidikan harus ditingkatkan, salah satunya dengan menambah anggaran untuk pendidikan dalam APBD. Berikut ini perkembangan anggaran pendidikan di lima Kabupaten/Kota di Propinsi D.I Yogyakarta selama tahun 2011-2015.



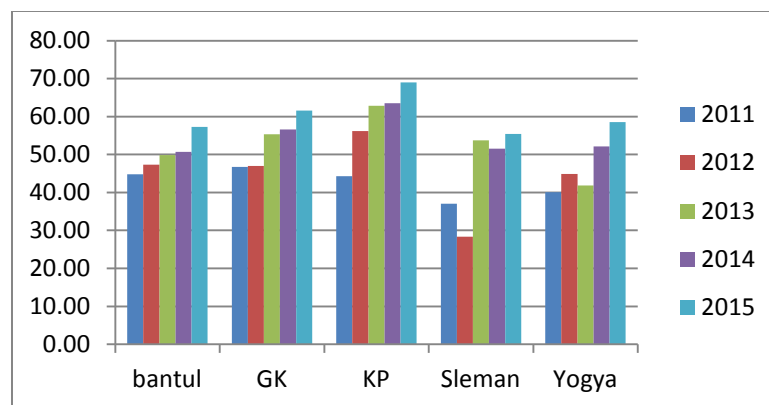
Gambar 1.4
Persentase Anggaran Pendidikan Kabupaten/Kota di DIY

Grafik tersebut menunjukkan persentase anggaran pendidikan tiap Kabupaten/Kota di DIY selama tahun 2011-2015. Dari grafik tersebut terlihat bahwa anggaran pendidikan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mengalami peningkatan pada tahun 2015 bila dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan untuk Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman terjadi penurunan anggaran pendidikan pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya instruksi dari gubernur untuk pemangkasan anggaran dalam APBD. Namun pemerintah daerah menjamin bahwa untuk program-program yang berkaitan langsung dengan kegiatan pelajar dari keluarga miskin tidak akan mengalami pemangkasan, sehingga masyarakat miskin tetap mendapat kemudahan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Selain pendidikan, langkah yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan meningkatkan infrastruktur yang ada dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur merupakan semua hal yang terkait dengan sistem fisik yang melayani transportasi, air, bangunan, dan fasilitas untuk publik yang lainnya yang bertujuan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Dalam penelitian ini, infrastruktur yang akan dibahas lebih lanjut adalah infrastruktur jalan berupa kondisi jalan.

Tersedianya infrastruktur jalan yang baik sangat diperlukan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas, baik lalu lintas manusia maupun lalu lintas hasil produksi. Masyarakat dapat menggunakan jalan untuk menuju ke tempat

yang diinginkan. Selain itu, akses jalan yang baik dapat mempengaruhi pihak investor yang akan berinvestasi. Apabila investasi di daerah tersebut banyak, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, kondisi jalan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terutama dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat menurunkan kemiskinan. Berikut ini persentase kondisi jalan yang baik dari masing-masing Kabupaten/Kota di DIY.



Gambar 1.5
Persentase Jalan Baik Kabupaten/Kota di DIY

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase kondisi jalan yang baik mengalami peningkatan setiap tahunnya pada masing-masing kabupaten/kota, dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan baiknya kondisi jalan di masing-masing kabupaten, diharapkan arus lalu lintas manusia maupun lalu lintas barang semakin lancar, masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Faktor berikutnya yang diduga mempengaruhi kemiskinan adalah industri kecil. Industri kecil juga memiliki peran penting dalam di dalam perekonomian di kawasan Asia khususnya Indonesia, terutama sebagai sumber utama terciptanya kesempatan kerja. Besarnya sumbangan terhadap penciptaan kesempatan kerja, industri kecil tersebut juga dianggap sangat penting terhadap pengurangan kemiskinan.

Perannya ini terkait dengan sejumlah karakteristik utama dari kelompok usaha tersebut, yakni :

1. Jumlahnya sangat banyak dan sangat berbeda dengan usaha menengah besar. Industri kecil lebih tersebar ke pelosok daerah, termasuk wilayah-wilayah yang relatif terisolasi.
2. Sangat padat karya, khususnya dari golongan angkatan kerja berpendidikan rendah.
3. Banyak kegiatan industri kecil berbasis pertanian, seperti industri-industri rumah tangga yang membuat makanan, minuman, dan meubel serta berbagai macam produk kerajinan berbasis bahan baku bambu, kayu, dan rotan. Di Indonesia, sebagian besar penduduk miskin tinggal di pedesaan dan sumber pendapatan paling dominan adalah sektor pertanian. Selain itu, industri kecil umumnya memproduksi barang-barang konsumsi dengan harga murah untuk kalangan masyarakat berpendapatan rendah, sehingga keberadaan industri kecil ini sangat membantu rumah tangga miskin.

Keberadaan industri kecil terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena industri kecil mampu menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah, menggunakan bahan baku lokal, menggunakan utang yang tidak terlalu besar, tidak terlalu mengandalkan teknologi canggih (padat modal) dan lebih mengandalkan tenaga kerja yang bersifat padat karya dimana lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia daripada mesin-mesin, dan sebagainya. Kondisi ini menyebabkan industri kecil sebagai salah satu langkah upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di suatu daerah.

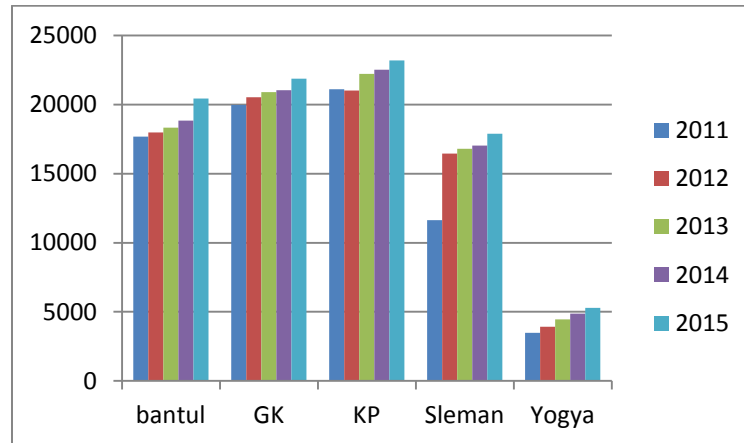
TABEL 1.1
Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri kecil di Provinsi DIY
Tahun 2010-2014

Provinsi	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja pada Industri kecil
DIY	2010	245.520
	2011	249.989
	2012	257.053
	2013	267.042
	2014	274.912

Sumber: Data diolah

Tabel 1.1 menunjukkan jika tenaga kerja yang terserap pada industri kecil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan setiap tahunnya berkisar 3%. Penyerapan tenaga kerja pada industri kecil menunjukkan bahwa peran industri kecil mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini perkembangan jumlah industri kecil tiap Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta selama tahun 2011-2015.



Gambar 1.6
Jumlah Industri Kecil Kabupaten/Kota di DIY

Grafik di atas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah industri kecil pada masing-masing Kabupaten/Kota di DIY mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga diharapkan industri kecil mampu berperan dalam menurunkan angka kemiskinan di DIY. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh industri kecil, infrastruktur jalan, dan anggaran pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.

B. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh industri kecil, infrastruktur jalan, dan anggaran pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta. Infrastruktur yang diteliti terbatas pada kondisi jalan yang baik. Periode penelitian mulai dari tahun 2007 sampai 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah industri kecil berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan?
2. Apakah infrastruktur jalan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan?
3. Apakah anggaran pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan?
4. Apakah secara simultan variabel industri kecil, infrastruktur jalan, dan anggaran pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh jumlah industri kecil terhadap tingkat kemiskinan.
2. Mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap tingkat kemiskinan
3. Mengetahui pengaruh anggaran pendidikan terhadap tingkat kemiskinan.
4. Mengetahui secara simultan variabel industri kecil, infrastruktur jalan, dan anggaran pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di daerah.